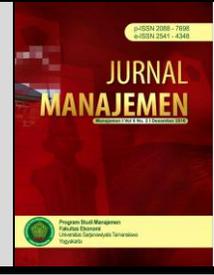




JURNAL MANAJEMEN

Terbit online : <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id>



PENGARUH SARANA PRASARANA, KEMAMPUAN PENGGUNA, SOSIALISASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) BAGI PENGELOLA KEUANGAN DI PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Yellita Eka Putri¹
Zuripal²

^{1,2}Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

Email: yellitaep@gmail.com

Informasi Naskah

Diterima:
18 September 2024
Revisi:
14 November 2024
Terbit:
20 November 2024

Abstract

This study aims to analyze the influence of infrastructure, user capability, socialization, and supervision on the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD). The population in this study was the Expenditure Treasurer and Assistant Expenditure Treasurer of Payakumbuh City.

Kata Kunci:
Effectiveness of Implementation, Infrastructure, User Capability, Supervision, Payakumbuh City

This study uses a quantitative method with primary data in the form of questionnaires with a sample size of 195 respondents taken based on saturated sampling technique. The data analysis technique used is descriptive analysis and inferential statistical analysis with Structural Equation Modeling (SEM) of various Partial Least Squares (PLS) variants.

The results showed that the availability of infrastructure, user capability, and supervision significantly influenced the effectiveness of SIPD implementation. However, socialization did not show a significant influence. This study concludes that to improve the effectiveness of SIPD, there needs to be an improvement in the quality of infrastructure, more intensive training for users, and better supervision mechanisms.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan sering kali dipandang sebagai tindakan yang menghasilkan dampak dalam penyelesaian tugas tertentu, menyediakan alat atau metode yang diperlukan

untuk mencapai hasil yang praktis (Tachjan, 2006). Menurut Joko Pramono (2020), pelaksanaan kebijakan mencakup serangkaian langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hill dan Hupe, (2002) menyatakan bahwa proses implementasi melibatkan penetapan tujuan dan penerapan berbagai cara untuk mencapainya, yang dapat dilakukan melalui pengeluaran kebijakan atau peraturan oleh lembaga pelaksana.

Dalam pemerintahan, implementasi kebijakan mencakup penerapan sistem informasi yang relevan. Contoh nyata adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menekankan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan, dan informasi pemerintahan lainnya yang terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Data dalam sistem ini terpusat dalam satu database, sejalan dengan konsep Satu Data Indonesia sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Untuk mempercepat implementasi SIPD, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan beberapa regulasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 137/736/SJ tanggal 27 Januari 2020. Peraturan ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk memanfaatkan SIPD dalam pengelolaan keuangan, termasuk sistem penggajian dan tata kelola keuangan daerah. Peraturan ini mengalami perubahan pada 12 Januari 2021, dimana SIPD diizinkan digunakan bersamaan dengan aplikasi lain, dengan tetap memerlukan input data pada SIPD.

Efektivitas penerapan SIPD menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Steers dalam Sutrisno (2015), efektivitas dapat diukur berdasarkan kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Pengukuran efektivitas mencakup tiga konsep utama: optimalisasi tujuan, perspektif sistem, dan perilaku manusia dalam organisasi. Implementasi SIPD diatur lebih lanjut oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pemerintahan daerah. SIPD diharapkan meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, implementasi SIPD menghadapi berbagai tantangan. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak sangat penting untuk kelancaran operasional SIPD. Kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem juga menentukan keberhasilan implementasi, sehingga pelatihan dan bimbingan teknis sangat diperlukan. Penelitian oleh Balqis et al. (2021) dan Fahzura (2020) menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengguna serta sosialisasi yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas SIPD.

Di Pemerintah Kota Payakumbuh, implementasi SIPD dimulai pada Januari 2023 dan berjalan paralel dengan aplikasi SIPKD. Namun, beberapa tantangan muncul, termasuk gangguan server, akses komputer yang terbatas, dan koordinasi yang tidak optimal. Terdapat juga masalah terkait fungsionalitas aplikasi SIPD dan proses administrasi yang mempengaruhi efektivitas sistem. Dilihat dari realisasi anggaran, terjadi penurunan realisasi di tahun 2023 yang menggunakan SIPD dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang menggunakan SIPKD, seperti yang terlihat ditabel dibawah ini :

Tabel 1. Tabel Realisasi Anggaran 2021-2023

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Belanja Operasi	620,936	567,613	622,545	577,363	718,440	649,290
2	Belanja Modal	125,765	110,130	129,578	118,552	89,140	83,816
3	Belanja Tak Terduga	0,5	-	0,233	-	0,75	0,208
4	Jumlah	747,200	677,743	752,356	695,916	808,330	733,314
5	Persentase (%)	100	90,70	100	92,50	100	90,72
6	Sistem Informasi Yang Digunakan	SIPKD		SIPKD		SIPD	

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2022 yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2021 sedangkan realisasi pada tahun 2023 yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengalami penurunan. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong utama peneliti untuk meneliti lebih mendalam. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sarana prasarana, kemampuan pengguna, sosialisasi, dan pengawasan terhadap efektivitas penerapan SIPD bagi pengelola keuangan di Pemerintah Kota Payakumbuh.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Definisi Efektivitas

Menurut Mahsun (2006), efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan target kebijakan yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuannya, tanpa mempertimbangkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Konteks efektivitas lebih berfokus pada pencapaian tujuan, bukan pada efisiensi biaya. Sedangkan Siagian (2002) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana secara optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan yang ditetapkan, maka semakin efektif kegiatan tersebut. Selain itu Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas memiliki hubungan erat antara hasil (*output*) dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi *output* dalam mencapai tujuan, semakin besar pula pengaruh organisasi dalam program dan rencana yang dicanangkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan elemen krusial dalam mengantarkan organisasi mencapai tujuannya. Ini sejalan dengan pendapat seperti Mardiasmo (2009), Mahsun (2006), Siagian (2002), Mahmudi (2015), dan Budiani (2007), terkait efektivitas. Semakin signifikan kontribusi keluaran, semakin besar dampak positif yang dihasilkan organisasi dalam program dan rencananya. Jadi kesimpulannya,

efektivitas organisasi terukur dari tiga aspek yaitu pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya yang optimal, dan kontribusi terhadap program dan rencana organisasi.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah dapat dilakukan secara profesional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Selain itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini.

Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bagi Pengelola Keuangan

Efektivitas disini diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan tercapainya sistem tata kelola keuangan yang berbasis elektronik untuk memudahkan analisis terhadap data pembangunan daerah yang terintegrasi antara sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Pengelolaan keuangan dilihat dari penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan yaitu memudahkan proses penatausahaan keuangan, adanya transparansi pengelolaan keuangan, dan memudahkan pengawasan terhadap penyerapan anggaran tingkat SKPD di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Payakumbuh telah menerapkan SIPD sejak Tahun 2020 untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan rencana kerja (renja) SKPD. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan merancang program pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang di dalamnya berisi tentang informasi kebutuhan anggaran. Sedangkan untuk penatausahaan keuangan mulai berjalan dari Januari 2023 dengan tetap paralel bersama aplikasi SIPKD dan mulai bulan Juni 2023 SIPD berdiri sendiri tanpa digandeng lagi dengan SIPKD. Menurut Ekaputra (2021) tujuan penggunaan aplikasi SIPD bagi pemerintah daerah, baik di provinsi, maupun kabupaten atau kota adalah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat.

Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau memeadai untuk mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk prantara yang di pakai orang untuk meyebar ide, sehingga ide tersebut bisa sampai pada penerima

Menurut Mulyani (2008) menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda

yang bergerak seperti komputer dan mesin. Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses (Usaha, Pembangunan, Proyek), prasarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, tanah.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana memainkan peran yang penting dalam mencapai maksud atau tujuan dalam berbagai konteks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau perantara untuk mencapai tujuan, sementara prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam sebuah proses. Hamalik (1980) menambahkan bahwa sarana dan prasarana merupakan alat yang digunakan untuk menyebarkan ide sehingga dapat sampai kepada penerima. Mulyani (2008) mendefinisikan sarana sebagai segala sesuatu yang berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan penekanan pada benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin. Sementara itu, prasarana dijelaskan sebagai sesuatu yang mendukung terselenggaranya sebuah proses, terutama pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah. Dengan demikian, sarana dan prasarana memiliki peran yang penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan terselenggaranya berbagai proses dalam konteks organisasi dan pembangunan.

Kemampuan Pengguna

Menurut Syaroni (2015), kemampuan pengguna merupakan kapasitas yang ditampilkan pada berbagai tugas yang dibutuhkan dalam pekerjaan mencakup pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan Menurut Meiryani (2015) menyatakan bahwa kemampuan pengguna adalah kemampuan dan bakat seseorang untuk melakukan berbagai tugas, dan menunjukkan kapabilitas yang dimiliki orang yang relatif stabil untuk mewujudkan tentang aktivitas tertentu yang berbeda, tetapi berhubungan atau terkait.

Adapun menurut Wibowo (2014) pengertian kemampuan pengguna adalah *Ability* atau Kemampuan menunjukkan kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, merupakan penilaian terhadap apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sekarang ini. Kemampuan menyeluruh individu pada dasarnya di bentuk oleh dua kelompok faktor penting yaitu *intellectual* dan *physical abilities*. Senada dengan Robbins, Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2014) memberikan pengertian kemampuan sebagai kapasitas mental dan fisik untuk mewujudkan berbagai tugas.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pengguna merupakan aspek penting dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas dalam pekerjaan. Syaroni (2015) menggambarkan kemampuan pengguna sebagai kapasitas yang menunjukkan kemampuan individu dalam menyelesaikan berbagai tugas yang diperlukan, termasuk pengetahuan dan keterampilan. Meiryani (2015) menambahkan bahwa kemampuan pengguna mencakup kemampuan dan bakat seseorang dalam melakukan berbagai tugas, menunjukkan kapabilitas yang relatif stabil untuk melakukan aktivitas tertentu yang berbeda tetapi terkait. Robbins, seperti yang dikutip oleh Wibowo (2014), menafsirkan kemampuan pengguna sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas-tugas dalam pekerjaan, dengan menilai apa yang dapat dilakukan oleh individu pada saat ini. Kemampuan tersebut mencakup aspek intelektual dan fisik, seperti yang diidentifikasi oleh Robbins, serta kapasitas mental dan fisik, sebagaimana dijelaskan oleh Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2014). Zain dan Babadu (2001) menekankan bahwa kemampuan pengguna mencerminkan kesanggupan dan kekuatan individu untuk melakukan tugas-tugas dengan diri sendiri. Jen (2002), seperti yang dikutip oleh Almilialia & Brilliantien (2007), menyoroti korelasi positif antara kemampuan teknik personal dalam

sistem informasi dengan kinerja sistem tersebut. Pendapat-pendapat ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang beragam namun terkait dalam konteks pekerjaan tertentu.

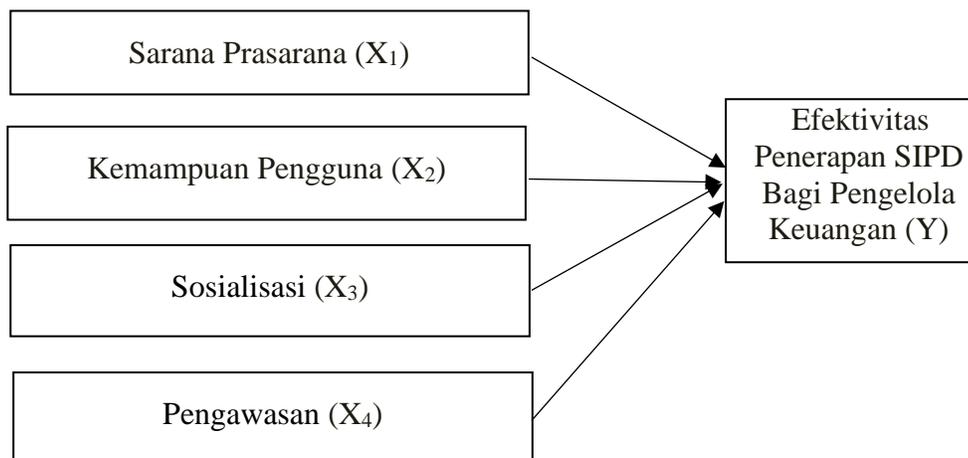
Pengawasan

Menurut Yohanes Yahya (2006), pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2002) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam konteks manajemen memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai secara efektif. Yohanes Yahya (2006) mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menegaskan hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Sondang P. Siagian (2002) menambahkan bahwa pengawasan melibatkan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Feriyanto & Shyta (2015) memandang pengawasan sebagai proses perbandingan atau pengukuran terhadap apa yang telah dilakukan dengan kriteria, norma, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Arifin dan Helmi (2016) mengartikan pengawasan sebagai usaha untuk menilai hasil yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, sehingga semua hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan hipotesis penelitian:

H1 : Sarana Prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD

H2 : Kemampuan Pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD

H3 : Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD

H4 : Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. populasi penelitian terdiri dari 31 (tiga puluh satu) OPD, dimana dari masing-masing OPD diambil dari 31 orang Bendahara Pengeluaran dan 164 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode sensus sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 195 orang responden.

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data Structural Equation Modelling (SEM) teknik statistik multivariat yang digunakan untuk memodelkan dan menguji hubungan antarvariabel dalam suatu kerangka kerja teoritis yang kompleks.

Dalam analisis dengan PLS ada dua hal yang dilakukan. Pertama, menilai outer model atau measurement model adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian. Ada tiga kriteria untuk menilai outer model, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Kedua, menilai inner model atau *structural model*. Pengujian inner model atau *structural model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian.

Evaluasi *outer model* disebut pula dengan evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator reflektif dievaluasi melalui *convergent validity* dan *discriminant validity* untuk indikator pembentuk konstruk laten, serta melalui *composite reliability* dan *Cronbach alpha* untuk blok indikatornya (Ghozali, 2014).

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari nilai R-square dari model penelitian dan juga dengan melihat besar koefisien jalur strukturalnya. Semakin tinggi nilai R², berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Model yang kuat ditunjukkan dengan nilai 0,67, model yang moderat ditunjukkan dengan nilai 0,33 dan model yang lemah ditunjukkan dengan nilai 0,19 (Ghozali, 2014). Nilai R² digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten (*independen*) terhadap variabel laten (*dependen*) atau seberapa besar pengaruhnya.

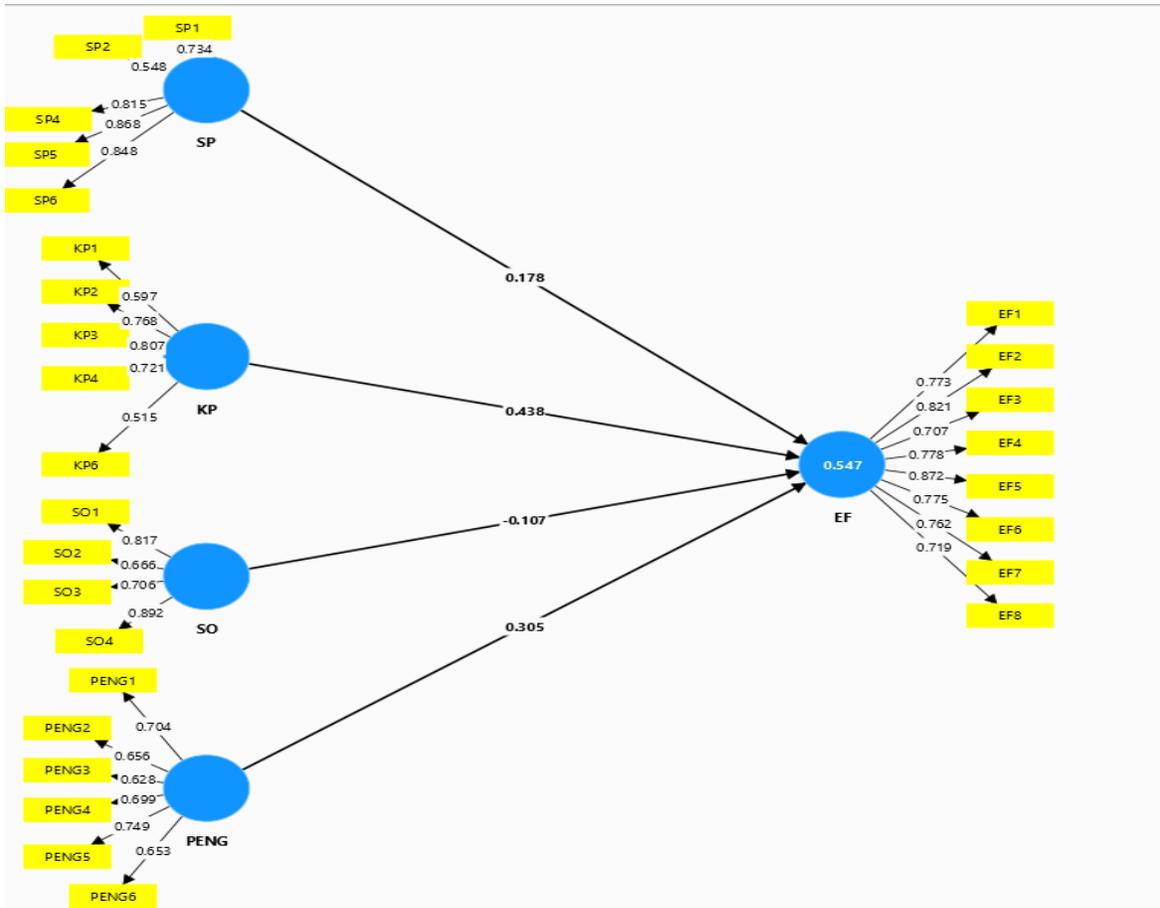
Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik untuk menunjukkan tingkat signifikansi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 melalui proses *bootstrapping*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Validitas Konvergen (*Convergen Validity*)

Peneliti menetapkan indikator dengan nilai outer loading diatas 0,5 dengan nilai AVE lebih besar dari 0,5. Pengolahan data dilakukan dengan memasukkan semua indikator kedalam variabel latennya kemudian dikalkulasikan PLS Algorithm. Indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai outer loading diatas 0,5 dan AVE besar dari 0,5. Berikut gambar hasil kalkulasi berserta nilai outer loadingnya:



Gambar 1. Diagram Jalur Loading Factor

Tabel 2. Hasil Loading Factor

Matrix	Efektivitas Penerapan SIPD	Kemampuan Pengguna	Pengawasan	Sosialisasi	Sarana Prasarana
EF1	0.773				
EF2	0.821				
EF3	0.707				
EF4	0.778				
EF5	0.872				
EF6	0.775				
EF7	0.762				
EF8	0.719				
KP1		0.597			
KP2		0.768			
KP3		0.807			
KP4		0.721			
KP6		0.515			
PENG1			0.704		
PENG2			0.656		
PENG3			0.628		

Matrix	Efektivitas Penerapan SIPD	Kemampuan Pengguna	Pengawasan	Sosialisasi	Sarana Prasarana
PENG4			0.699		
PENG5			0.749		
PENG6			0.653		
SO1				0.817	
SO2				0.666	
SO3				0.706	
SO4				0.892	
SP1					0.734
SP2					0.548
SP4					0.815
SP5					0.868
SP6					0.848

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024

Nilai *loading factor* tahap kedua yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 1 terlihat bahwa semua indikator mempunyai *loading factor* lebih besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik.

Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE) Tahap Keempat

	Average variance extracted (AVE)
Efektivitas Penerapan SIPD	0.604
Kemampuan Pengguna	0.538
Pengawasan	0.558
Sosialisasi	0.602
Sarana Prasarana	0.595

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian tahap keempat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, didapat bahwa nilai AVE setiap variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0.5 ini berarti seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

b. Validitas Diskriminan

Cross loading setiap indikator harus memiliki loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur, dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya. Hasil output dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Cross Loading

<i>Discriminant Validity</i>					
<i>Cross Loadings</i>					
Matrix	Efektivitas SIPD	Kemampuan Pengguna	Pengawasan	Sosialisasi	Sarana Prasarana
EF1	0.775	0.530	0.461	0.302	0.433

Discriminant Validity					
Cross Loadings					
Matrix	Efektivitas SIPD	Kemampuan Pengguna	Pengawasan	Sosialisasi	Sarana Prasarana
EF2	0.818	0.506	0.394	0.279	0.457
EF3	0.704	0.358	0.371	0.213	0.372
EF4	0.775	0.559	0.489	0.200	0.447
EF5	0.871	0.595	0.511	0.334	0.520
EF6	0.774	0.485	0.569	0.272	0.377
EF7	0.767	0.612	0.452	0.342	0.516
EF8	0.722	0.549	0.360	0.312	0.478
KP1	0.351	0.590	0.444	0.523	0.272
KP2	0.449	0.753	0.449	0.502	0.449
KP3	0.660	0.842	0.450	0.313	0.565
KP4	0.480	0.727	0.513	0.244	0.461
PENG1	0.436	0.429	0.761	0.411	0.312
PENG4	0.330	0.293	0.700	0.446	0.339
PENG5	0.563	0.621	0.806	0.354	0.518
PENG6	0.357	0.440	0.718	0.343	0.288
SO1	0.325	0.442	0.469	0.817	0.270
SO2	0.208	0.284	0.325	0.667	0.250
SO3	0.195	0.341	0.338	0.707	0.256
SO4	0.358	0.464	0.426	0.892	0.331
SP1	0.499	0.377	0.332	0.222	0.734
SP2	0.439	0.449	0.471	0.239	0.547
SP4	0.378	0.416	0.336	0.255	0.815
SP5	0.470	0.570	0.405	0.349	0.868
SP6	0.414	0.526	0.373	0.296	0.849

Sumber :Hasil Olahan Data 2024

Berdasarkan Tabel 4 diatas diketahui bahwa nilai *cross loading* antara variabel dengan indikatornya lebih besar dari pada nilai korelasi variabel laten lainnya dengan indikator variabel tersebut. Nilai *cross loading* variabel efektivitas penerapan SIPD dengan indikator EF1 sebesar 0.775. Nilai tersebut lebih besar dari pada nilai *cross loading* dengan variabel kemampuan pengguna, pengawasan, sosialisasi, dan sarana prasarana yaitu 0.530, 0.461, 0.302, dan 0.433. Begitu juga pada indikator lainnya, semua nilai *cross loading* variabelnya lebih besar daripada *cross loading* dengan variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik.

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengevaluasi alat ukur yang digunakan telah sesuai atau belum dengan kenyataan di lapangan. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai composite reliability > 0.7 dan nilai cronbarch alpha > 0.6. Berikut merupakan nilai composite realibility dan nilai cronbarch alpha dipaparkan pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 5. Nilai Reliabilitas Masing-Masing Variabel Penelitian

<i>Construct Reliability and Validity</i>				
Matrix	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Efektivitas Penerapan SIPD	0.906	0.911	0.924	0.604
Kemampuan Pengguna	0.713	0.760	0.821	0.538
Pengawasan	0.742	0.771	0.835	0.558
Sosialisasi	0.781	0.835	0.856	0.602
Sarana Prasarana	0.821	0.822	0.878	0.595

Sumber : Hasil Olahan Data 2024

Berdasarkan Tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit seluruh variabel laten berkisar antara 0.821 sampai dengan 0.924 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0.7. Kemudian nilai *Cronbach's alpha* berkisar antara 0,713 sampai dengan 0,906. Hal ini mencerminkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel sudah bernilai lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan dari hasil *composite reliability* dan *cronbach's alpha* semua variabel memiliki nilai reliabilitas yang baik.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian R-square

Tabel 6. Nilai R- Square

	R-square	R-square adjusted
Efektivitas Penerapan SIPD	0.539	0.529

Sumber: Hasil Olahan Data 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai R^2 yang tertera pada output di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Efektivitas Penerapan SIPD dijelaskan oleh variabel sarana prasarana, kemampuan pengguna, sosialisasi dan pengawasan sebesar 0.539 atau 53.9 persen sisanya 46.1 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Q-square

Dalam Ghazali (2016) disebutkan nilai *predictive – relevance* diperoleh dengan rumus Hair, Jr. & Joseph F (2011) yaitu :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \dots (1 - R_n^2)$$

Dimana nilai $R_1^2, R_2^2 \dots R_n^2$ adalah nilai R-Square variabel endogen dalam model. Berdasarkan nilai R-Square yang terdapat pada Tabel 10 di atas, maka nilai Q-Square dengan menggunakan rumus *Stone-Geisser Q Square Test* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

$$Q_2 = 1 - (1 - R_1^2)$$

$$Q_2 = 1 - (1 - 0.539^2)$$

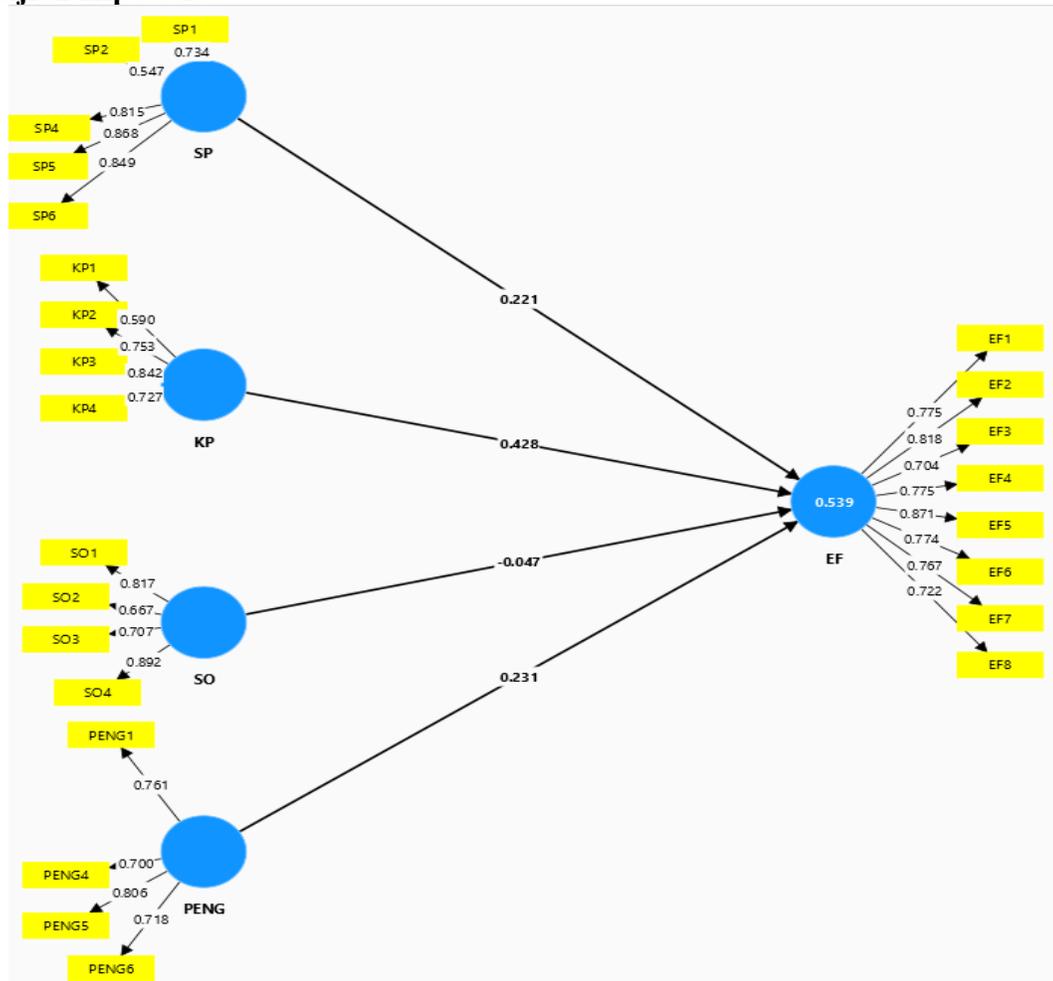
$$Q_2 = 1 - (1 - 0.291)$$

$$Q_2 = 0,291$$

Perhitungan Q-Square dalam studi ini menghasilkan nilai 0,291 setara dengan 29,10%. Angka

ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki relevansi prediktif karena > 0 dan tergolong sedang yang berarti menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance* yang baik. Dengan kata lain, model yang digunakan mampu menjelaskan 29,10% dari informasi yang terkandung dalam data penelitian.

Pengujian Hipotesis



Gambar 2. Diagram Jalur Hasil Hipotesis

Tabel 7. Hasil Path Coefficient Model Jalur

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Kemampuan Pengguna -> Efektivitas Penarapan SIPD	0.428	0.423	0.080	5,369	0.000
Pengawasan -> Efektivitas Penarapan SIPD	0.231	0.234	0.065	3,550	0.000
Sosialisasi ->	-0.047	-0.041	0.045	1,051	0.294

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Efektivitas Penarapan SIPD					
Sarana Prasarana -> Efektivitas Penarapan SIPD	0.221	0.225	0.070	3,168	0.002

Sumber: Hasil Olahan Data 2024

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Efektivitas Penerapan SIPD

Hasil pengujian menunjukkan hubungan variabel sarana prasarana terhadap efektivitas penerapan SIPD mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,221, kemudian nilai t-statistics sebesar 3,168 dan p value sebesar 0,002 yang bermakna hubungan antar variabel ini adalah signifikan karena nilai t-statistic yang lebih besar dari acuan yaitu 1,96 dan p value yang lebih kecil dari 0,05. Artinya setiap ada perubahan pada variabel sarana prasarana akan mempengaruhi variabel efektivitas penerapan SIPD. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Sarana Prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas penerapan SIPD. Sehingga terdapat hubungan langsung antara sarana prasarana terhadap efektivitas penerapan SIPD, sehingga hipotesis pertama (H1) **Diterima**.

Dari hasil dan dukungan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan langsung antara sarana prasarana dengan efektivitas penerapan SIPD di Pemerintah Kota Payakumbuh. Penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti komputer dengan spesifikasi tinggi, jaringan internet cepat, dan peralatan kantor yang berfungsi dengan baik, merupakan faktor penting dalam mendukung penerapan SIPD yang efektif. Hal ini relevan dengan penelitian Saraswati et al., (2021) yang menemukan bahwa variabel Sarana Prasarana berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Banyumanik. Sejalan dengan hal itu, Nugraha et al., (2020) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sarana prasarana terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh Kemampuan Pengguna Terhadap Efektivitas Penerapan SIPD

Hasil pengujian menunjukkan hubungan variabel kemampuan pengguna terhadap efektivitas penerapan SIPD mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,428, kemudian nilai t-statistics sebesar 5,369 dan p value sebesar 0,000 yang bermakna hubungan antar variabel ini adalah signifikan karena nilai t-statistic yang lebih besar dari acuan yaitu 1,96 dan p value yang lebih kecil dari 0,05. Artinya Setiap peningkatan kemampuan pengguna 1 (satu) satuan, akan menaikkan efektivitas penerapan SIPD sebesar 0,428 satuan. Semakin tinggi kemampuan pengguna maka semakin tinggi efektivitas penerapan SIPD. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas penerapan SIPD. Sehingga terdapat hubungan langsung antara kemampuan pengguna terhadap efektivitas penerapan SIPD, sehingga hipotesis kedua (H2) **Diterima**.

Hasil pengujian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pengguna merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan SIPD. Pengguna yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan SIPD akan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Dari hasil dan dukungan data

tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan langsung antara kemampuan pengguna dengan efektivitas penerapan SIPD. Peningkatan kemampuan pengguna, yang dapat diperoleh melalui seminar, bimtek, workshop, dan program pelatihan, merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penerapan SIPD. Pengguna yang lebih ahli dan memiliki pengetahuan yang memadai akan dapat memanfaatkan SIPD dengan lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fatmawati, Dwi Cahyono, Astrid Maharani (2019) tentang pengaruh partisipasi pemakai sistem informasi, kemampuan pemakai sistem informasi, ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Diperoleh hasil pengujian regresi berganda menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa Partisipasi pemakai sistem informasi, kemampuan pemakai system, dan ukuran organisasi yang baik akan meningkatkan kinerja SIA.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Efektivitas Penerapan SIPD

Hasil pengujian menunjukkan hubungan variabel sosialisasi terhadap efektivitas penerapan SIPD mempunyai nilai *original sample* sebesar -0,047, kemudian nilai t-statistics sebesar 1,051 dan p value sebesar 0,294 yang bermakna hubungan antar variabel ini adalah tidak signifikan karena nilai t-statistic yang lebih kecil dari acuan yaitu 1,96 dan p value yang lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Efektivitas penerapan SIPD. Sehingga tidak terdapat hubungan langsung antara sosialisasi terhadap efektivitas penerapan SIPD, sehingga hipotesis ketiga (H3) **Ditolak**. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah, (2020) tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Diperoleh hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerapan SIPD

Hasil pengujian menunjukkan hubungan variabel pengawasan terhadap efektivitas penerapan SIPD mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,231, kemudian nilai t-statistics sebesar 3,550 dan p value sebesar 0,000 yang bermakna hubungan antar variabel ini adalah signifikan karena nilai t-statistic yang lebih besar dari acuan yaitu 1,96 dan p value yang lebih kecil dari 0,05. Artinya Setiap peningkatan pengawasan 1 (satu) satuan, akan menaikkan efektivitas penerapan SIPD sebesar 0,231 satuan. Semakin tinggi pengawasan maka semakin tinggi efektivitas penerapan SIPD. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas penerapan SIPD. Sehingga terdapat hubungan langsung antara pengawasan terhadap efektivitas penerapan SIPD, sehingga hipotesis keempat (H4) **Diterima**. Dari hasil dan dukungan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan langsung antara pengawasan dengan efektivitas penerapan SIPD. Hal ini juga didukung oleh persepsi responden yang mengakui pentingnya pemeriksaan data, konsistensi informasi, dan tindakan koreksi dalam mendukung penerapan SIPD.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian pengaruh variabel sarana prasarana, kemampuan pengguna, sosialisasi dan pengawasan terhadap efektivitas penerapan SIPD bagi Pengelola Keuangan di Pemerintah Kota Payakumbuh, maka dapat disimpulkan bahwa Sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD. Sehingga

pada penelitian ini terdapat pengaruh langsung antara sarana prasarana dengan efektivitas penerapan SIPD. Kemudian Kemampuan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD. Sehingga pada penelitian ini terdapat pengaruh langsung antara kemampuan pengguna dengan efektivitas penerapan SIPD. Selanjutnya Sosialisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD. Terakhir Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPD. Sehingga pada penelitian ini terdapat pengaruh langsung antara pengawasan dengan efektivitas penerapan SIPD.

REFERENSI

- Azizah, F. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus KPP Pratama Pare). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i1.169>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Edy Sutrisno. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Everret M. Rogers. (2003). *Diffusion of Innovation*. New York: Free Press.
- Fahzura, L. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issue*. Retrieved from <http://journal.pencerah.org/jspi>.
- Fatmawati, I., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi, Kemampuan Pemakai Sistem Informasi, Ukuran Organisasi Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i1.17159>
- George Herbert Mead. (1934). *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ghozali, I. (2014). *Structural equation modelling: Metode alternatif dengan partial least squares (PLS)* (edisi ke-4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., M.Hult, G. T., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least square equation modeling (PLS-SEM)*. (G. Dickens, Ed.). SAGE Publications.
- Handoko. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia* (Revisi Jak). Jakarta: P Gramedia Pustaka.
- Hill, M.,Hupe, P. (2005). *Implementing Policy*. Thousand Oaks: Sage.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik*. (M. P. Dr. Sutoyo, Ed.). Yogyakarta: UNISRI Press. Retrieved from https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (UPP STIM YKPN).
- Mahsun. (2006). *Manajemen Publik : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Ekonomi Publik : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mulyani, S. (2008). *Modul memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran*. Jakarta: erlangga.
- Saraswati, A., Budi, L., & Minarsih, M. M. (2021). Pengaruh Kompensasi, Komunikasi, dan

- Sarana Prasarana Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *Journal of Management*, 7(1), 1–11. Retrieved from <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/1736><http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/1736/1676>
- Siahaan, Y. L. O., & Meilani, R. I. (2019). Sistem Kompensasi dan Kepuasan Kerja Guru Tidak Tetap di Sebuah SMK Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18008>
- Sondang P. Siagian. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi aksara.
- Stephen Robbins & Timothy A. Judge. (2008). *organizational Behavior* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman, D., & Kurniadi, B. (2015). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD Majalaya Kabupaten Bandung. *Jurnal Sospol*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D/Sugiyono* (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja* (Edisi ke E). Rajawali Pers.
- Yohanes. Yahya. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yunus, A., & Nawawi, W. (2013). *Keefektifan organisasi: Sebuah perspektif multidimensi*. Majalengka: Universitas.
- Zain Babadu. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.